

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**KEARIFAN LOKAL “SATU TUNGKU TIGA BATU” DALAM
PENANGGULANGAN STUNTING: KAJIAN KOLABORASI TOKOH
PEMERINTAH, ADAT DAN AGAMA**

Tim Peneliti:

Septi Wulandari, S.Sos.,M.A.P.
Esa Septian, S.A.P.,MPA.
Vita Nugrah Septiana
Novita Elisa Rusdiana Putri

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

Nomor Kontrak:

012 / LPPM-LIT / UB / XI / 2024

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Kearifan Lokal “Satu Tungku Tiga Batu” Dalam Penanggulangan *Stunting*: Kajian Kolaborasi Tokoh Pemerintah, Adat Dan Agama
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Septi Wulandari, S.Sos.,M.A.P.
 - b. NIDN : 0709099901
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : septiwuland09@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama Dosen : Esa Septian, S.A.P.,MPA.
 - b. NIDN : 0727119701
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : esaseptian28@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama Mahasiswa : Vita Nugrah Septiana
 - b. NIM : 2163211118
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : Vesubagyo36@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
- Anggota Peneliti 3**
 - a. Nama Mahasiswa : Novita Elisa Rusdiana Saputri
 - b. NIM : 23632011095
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. Email : ersnovita@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
7. Dana Diusulkan : Rp. 3.000.000,00

Bojonegoro, 24 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina R, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Septi Wulandari, S.Sos.,M.A.P.
NIDN. 07 0909 9901

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian internal dosen yang berjudul “Kearifan Lokal “Satu Tungku Tiga Batu” Dalam Penanggulangan *Stunting*: Kajian Kolaborasi Tokoh Pemerintah, Adat Dan Agama”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar untuk membantu dalam penyusunan proposal penelitian internal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan rujukan dan masukan bagi pembaca. Terimakasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mengajukan proposal penelitian ini sesuai alur yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Teknik Analisa Data	29
3.6 Validitas Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil dan Pembahasan Penelitian	30
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. Profil Informan Penelitian.....	27
Tabel 3. Data Jumlah Balita Terdaftar Posyandu.....	32
Tabel 4. Hasil Kondensasi Dimensi <i>Co-Financing</i>	39
Tabel 5. Hasil Kondensasi Dimensi <i>Co-Production</i>	43
Tabel 6. Hasil Kondensasi Data Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Kolaborasi Collaborative Governance Theory	7
Gambar 2. Model Kolaborasi <i>Country Collaboration Theory</i>	12
Gambar 3. Kerangka konsep penelitian	17
Gambar 4. IPM Indonesia, Papua Barat, dan Kabupaten Fakfak Tahun 2021	26
Gambar 5. Kegiatan Posyandu yang Sepi Peminat	32
Gambar 6. Pelaksanaan Wewowo dengan Alas Tikar, Kain Putih, <i>Nahahara</i> , dan Duduk Melingkar	36
Gambar 7. <i>Toast</i> Cangkir sebagai Tanda Kesepakatan.....	37
Gambar 8. Ilustrasi Tahap Diskusi Tatap Muka Penanggulangan <i>Stunting</i>	37
Gambar 9. Poster Visi dan Misi Kabupaten Fakfak.....	41
Gambar 10. Peraturan Bupati Fakfak No 62 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi	42
Gambar 11. Perjanjian Tertulis sebagai Bentuk Kemenangan Kecil Kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu	45
Gambar 12. Proses Kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu	49

ABSTRAK

Prevalensi stunting di Kabupaten Fakfak cukup tinggi, yakni 26%. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah angka stunting yang tinggi, salah satunya dengan menggandeng tungku tiga batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola proses kolaborasi "satu tungku tiga batu" yang melibatkan tokoh pemerintah, adat istiadat, dan agama serta mengetahui dukungan dan kendala dalam proses kolaborasi. Metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dimana pendekatan ini berupaya untuk memaknai fenomena "satu tungku tiga batu" dengan penelitian lapangan dan literatur. Peneliti mengamati langsung fenomena satu tungku tiga batu, melakukan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Menganalisa fenomena "satu tungku tiga batu" dengan menggunakan teori pemerintahan kolaboratif dan kolaborasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi satu tungku tiga batu dalam penurunan stunting telah mengintegrasikan nilai-nilai yang biasa digunakan oleh tokoh adat dan agama dengan menempatkan dialog tatap muka secara informal, menciptakan komitmen yang ditandai dengan pengakuan saling ketergantungan, dan berbagi sumber daya, serta pemahaman untuk mencapai kemenangan kecil. Faktor pendukung kolaborasi menemukan kesadaran dari tiga tokoh dan masyarakat bahwa stunting sudah menjadi masalah besar, ada bentuk kerja sama dari tiga tokoh tersebut, dan ada sistem dan team building. Sementara itu, kendala yang muncul adalah ketimpangan biaya, kurangnya pemahaman, terutama dukungan dari OPD, ego sektoral dari pemerintah.

Kata Kunci: Satu tungku tiga batu, stunting, *Collaborative Governance*, *Country Collaboration*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ambitious World Health Assembly menargetkan penurunan 40% angka *stunting* di seluruh dunia pada tahun 2025 sejak kondisi tahun 2013. Global Nutritional Report 2018 melaporkan bahwa terdapat sekitar 150,8 juta (22,2%) balita *stunting* yang menjadi salah satu faktor terhambatnya pengembangan manusia di dunia. *World Health Organization* (WHO) menetapkan lima daerah subregio prevalensi *stunting*, termasuk Indonesia yang berada di regional Asia Tenggara (36,4%) (UNICEF/WHO/WORLD BANK, 2021).

Indonesia memiliki tingkat prevalensi pertama tertinggi, yaitu sebesar 31,8% pada tahun 2020 (UNICEF/WHO/WORLD BANK, 2021). Data WHO tersebut menunjukkan sedikit perbedaan dengan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan tingkat prevalensi *stunting* Indonesia yaitu sebesar 24,4% di tahun 2021. Angka ini menurun dibandingkan prevalensi balita *stunted* di tahun 2019 yaitu sebesar 27,7% (Kemenkes, 2021). Kedua data tersebut menunjukkan Indonesia masih memiliki tingkat prevalensi Indonesia masih sangat tinggi (di atas 30%) dan tinggi (20-30%) (de Onis et al., 2019).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak tahun 2022, dapat diketahui bahwa angka prevalensi balita *stunting* di kabupaten Fakfak pada tahun 2021 sebesar 1590 anak atau 23,27%. Persentase prevalensi *stunting* tertinggi terjadi pada distrik Fakfak Timur Tengah dengan total *stunting* 84 balita atau 54,90%. Data diatas dikumpulkan melalui data Posyandu yang ada di masing-masing distrik, sehingga terdapat perbedaan dengan data *stunting* Kabupaten Fakfak yang dirilis oleh Kemenkes pada gambar 4 (26%) yang dikumpulkan melalui data sampel dengan data observasi (23,37%). Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran ibu atau calon ibu untuk memeriksakan diri ke unit kesehatan. Hal ini juga menjadi peningkat risiko *stunting* pada anak. Selain kesadaran yang rendah, terdapat faktor lain yang menyebabkan ibu tidak memeriksakan diri atau anaknya ke lembaga kesehatan, misalnya pernikahan di usia dini.

Stunting sebagai permasalahan yang muncul akibat sosio, ekonomi, dan kultural membutuhkan solusi yang juga melibatkan tiga aspek tersebut. Salah satu kearifan lokal dalam budaya masyarakat Fakfak yang disebut sebagai “Satu Tungku Tiga Batu” (*Toromit War Istery*) dapat menjadi landasan kolaborasi yang tepat antara pemerintah dan non-pemerintah di Kabupaten Fakfak, khususnya dalam penanggulangan *stunting*. “Satu Tungku Tiga Batu” merupakan simbol kerukunan di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat (Rusyaidd et al., 2022). Konsep “Satu Tungku Tiga Batu” merupakan suatu nilai budaya yang pertama-tama bertalian erat dengan sistem kekerabatan suku. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep satu tungku tiga batu juga dikaitkan dengan keberadaan hidup masyarakat secara menyeluruh (Alfons Pandie, 2018). Adaptasi filosofi tersebut diaplikasikan dalam kolaborasi antara Pemerintah, Adat, dan Agama (Resubun et al., 2021) yang diterapkan dengan membangun kerja sama antara ketiga pihak yang terdiri dari tokoh pemerintah, adat, dan agama untuk mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat (Humas dan Protokol Kankemenag Kabupaten Fakfak, 2021). Ketiga unsur ini merupakan tiga pilar utama yang menopang jalannya kehidupan masyarakat Fakfak. Ketiga unsur tersebut disatukan dengan kepercayaan, saling dukung, untuk mencapai tujuan bersama. Filosofi yang awalnya diterapkan agar melahirkan toleransi dan kerja sama dalam menjaga kerukunan masyarakat, kemudian diterapkan dalam membangun implikasi kebijakan yang bertujuan untuk membangun kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak ada pertentangan antara kebijakan pemerintah dengan agama yang ada, demikian juga antara pemerintah dan adat (Alfons Pandie, 2018).

Sebelumnya peneliti telah melakukan pra survey untuk mengamati bagaimana keadaan yang terjadi di lapangan. Peneliti menemukan fakta bahwa adanya penolakan yang terjadi khususnya kehadiran tenaga kesehatan ketika akan melakukan kegiatan berupa posyandu terhadap balita di kampung untuk melihat seberapa potensi partisipasi masyarakat sekaligus melakukan *crosscheck* kesehatan pada anak dan balita, namun realitanya didapat bahwa penolakan dilakukan oleh masyarakat ketika pemeriksaan berlangsung saat posyandu. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan mindset tentang pentingnya kesehatan

dikalangan masyarakat kampung, serta kebiasaan masyarakat yang senantiasa melihat figur siapa yang datang. Upaya pendekatan kepada masyarakat terus dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui pastor serta tua- tua adat dikampung tersebut dengan cara berkomunikasi, duduk bersama dengan masyarakat menggunakan bahasa sehari- hari dengan tujuan menyadarkan masyarakat tentang kesehatan. Melalui bantuan Pastor serta tua- tua adat, lama kelamaan masyarakat menerima kehadiran tenaga kesehatan dengan baik. Adanya pengaruh dari pastor dan tua-tua adat tersebut secara langsung membantu mengubah pola pikir masyarakat yang dibuktikan dengan adanya kemauan masyarakat untuk mendengarkan dan melakukannya serta dibuktikan dengan partisipasi masyarakat meningkat pada saat posyandu berlangsung bulan berikutnya, serta diperkuat dengan turunnya angka prevalensi stunting di Kabupaten Fakfak pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 1,2%. Sedangkan dari tahun 2021 ke tahun 2022 turun menjadi 0,2%. Hal ini menjadi alasan kuat untuk perlunya kolaborasi antara tokoh pemerintah, adat dan agama itu dilakukan.

Penerapan kolaborasi antara tiga unsur tersebut dilakukan dengan penggerakan sumber daya masing-masing unsur dalam rangka pencapaian tujuan bersama, dalam hal ini penanggulangan *stunting*. Lembaga pemerintah memiliki posisi yang menguntungkan karena otoritas regulasi serta adanya anggaran dan kemampuan penyediaan sumber daya manusia kesehatan berkualitas. Di sisi lain, lembaga adat dan lembaga agama memiliki tempat di tengah masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat setempat (Resubun et al., 2021). Kearifan lokal ini dapat diaplikasikan dalam mendorong suksesi implementasi kebijakan. Kolaborasi antar pihak-pihak yang memiliki posisi strategis di bidang adat dan agama yang memiliki posisi penting di Kabupaten Fakfak diharapkan dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan secara berkelanjutan terutama dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Fakfak.

Kebaruan empiris penelitian adalah adaptasi filosofi kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu” sebagai landasan kerja sama tokoh pemerintah, adat, dan agama Kabupaten Fakfak dalam penanggulangan *stunting*. Secara metodologis, penelitian sebelumnya memang sudah banyak yang melakukan dengan pendekatan

fenomenologi begitupun secara teoritis, teori *collaborative governance* dan *country collaboration* sudah pernah digunakan, namun berdasarkan penjelasan diatas mengenai kebaharuan empiris serta berdasarkan penelusuran pada penelitian terdahulu, belum ada yang melakukan penelitian di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dengan mengaitkan antara kolaborasi satu tungku tiga batu dengan penanggulangan stunting sehingga itu menjadi kebaharuan empiris dalam penelitian ini. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: kearifan lokal “satu tungku tiga batu” dalam penanggulangan *stunting* : kajian kolaborasi tokoh pemerintah, adat dan agama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah ‘Bagaimana kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu” dilakukan dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten FakFak’?

Secara lebih spesifik masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kolaborasi satu tungku tiga batu (pemerintah, tokoh adat dan agama) dalam penanggulangan *stunting*?
2. Apa saja yang termasuk pendukung dan hambatan dalam proses kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat dan agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang proses kolaborasi dalam mengimplementasikan kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu” yang dilakukan oleh tiga tokoh dalam penanggulangan *stunting*. Sedangkan secara spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses kolaborasi satu tungku tiga batu (pemerintah, tokoh adat dan agama) dalam penanggulangan *stunting* di kabupaten Fakfak.
2. Mengetahui faktor pendukung dan hambatan dalam proses kolaborasi antar pemerintah, tokoh adat dan agama.
3. Mengidentifikasi bagaimana kepemimpinan memfasilitasi terjadinya proses kolaborasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1.1.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi akademik berikutnya khususnya terkait penerapan kearifan lokal, kolaborasi, dan filsafah “Satu Tungku Tiga Batu” untuk akademisi dan peneliti.

1.1.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan menganalisis terkait kolaborasi satu tungku tiga batu dalam penanggulangan stunting.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dalam Menyusun kebijakan yang ideal dalam merumuskan bagaimana kolaborasi satu tungku tiga batu dalam penanggulangan stunting.

c. Bagi Universitas Bojonegoro

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi Universitas Bojonegoro dalam mempelajari bagaimana kajian kolaborasi satu tungku tiga batu dalam penanggulangan stunting.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

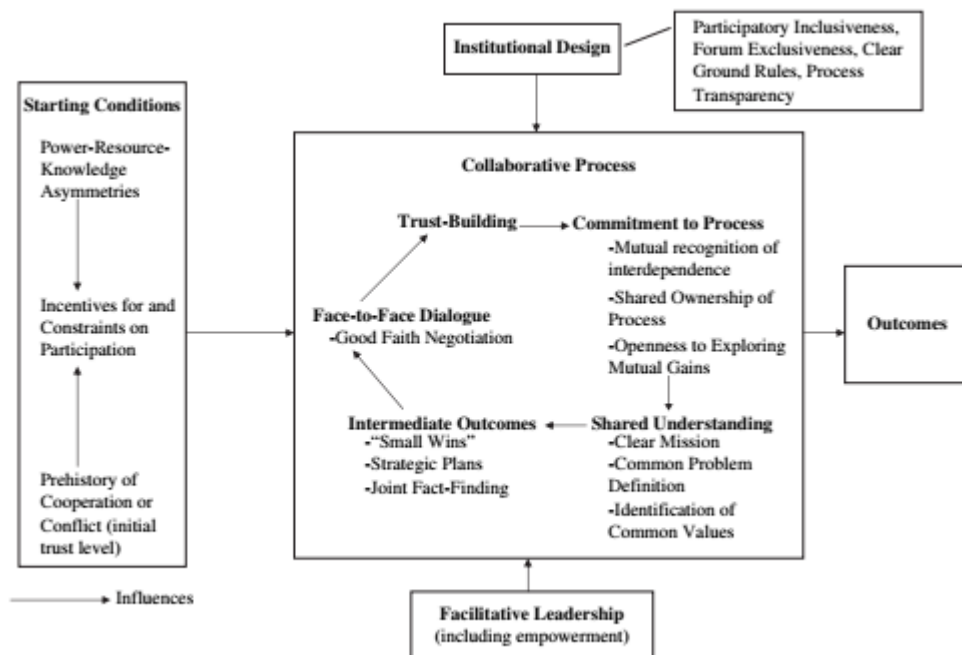
2.1 Landasan Teori

1) *Collaborative Governance Theory*

Berdasarkan teori *collaborative theory* yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008), *collaborative governance* merupakan model *governance* yang melibatkan kerjasama *Stakeholders* publik dan swasta dalam menetapkan kebijakan dan prosedur untuk penyediaan barang publik. Implementasi tata kelola kolaboratif membutuhkan interaksi yang kompleks antara sejumlah besar *Stakeholders* yang saling bergantung (Bianchi et al., 2021). Dalam teori ini, satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Sun, 2017).

Collaborative governance juga didefinisikan secara luas sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau ruang publik, swasta, dan sipil di untuk melaksanakan tujuan umum yang tidak dapat dicapai dengan cara lain (Emerson et al., 2012). Untuk menerapkan kebijakan publik, menjalankan program, atau mengurus aset, tata kelola kolaboratif mengacu pada seperangkat pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung menggabungkan pemangku kepentingan non-negara dalam pembuatan kebijakan formal, berorientasi konsensus, dan dalam proses deliberatif (Sun, 2017). Munculnya tata kelola kolaboratif dapat bersifat adaptif atau disengaja (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative governance* diperlukan terutama ketika terdapat tujuan yang tidak dapat atau sulit untuk dicapai secara terpisah sehingga memerlukan kolaborasi atau kerjasama antara individu, kelompok, atau lembaga. Kolaborasi ini umumnya melibatkan pengelolaan pemerintahan, publik dan/atau swasta.

Bagian utama dalam model tersebut yaitu proses kolaborasi yang terdiri dari lima tahapan utama (Ansell & Gash, 2008). Tahapan tersebut diilustrasikan pada gambar berikut yang kemudian dijelaskan pada bagian berikutnya.



Gambar 1. Model Kolaborasi Collaborative Governance Theory
(sumber: Ansell & Gash, 2008)

Masing-masing tahapan di atas dijelaskan sebagai berikut.

a) Kondisi Awal

Kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerjasama antar pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. Pada kondisi awal, terdapat dua jenis situasi (Ansell & Gash, 2008). Pertama, para pemangku kepentingan memiliki sejarah perpecahan pahit atas beberapa isu lokal yang bermuatan emosional dan telah menganggap satu sama lain sebagai musuh yang tidak bermoral. Dalam kasus lain, para pemangku kepentingan memiliki visi bersama untuk apa yang ingin mereka capai melalui kolaborasi dan sejarah kerjasama masa lalu dan saling menghormati. Dalam kedua kasus, kolaborasi mungkin

sulit, tetapi kasus pertama harus segera mengatasi masalah ketidakpercayaan, rasa tidak hormat, dan antagonisme.

(i) Asimetri/Ketidakseimbangan Kekuatan, Sumber Daya, dan Pengetahuan

Dalam proses ini, *stakeholders* dengan sumber daya yang paling besar perlu berkomitmen dalam strategi positif pemberdayaan dan keterwakilan pemangku kepentingan yang lebih lemah atau kurang beruntung (Ansell & Gash, 2008). Kondisi yang dapat terjadi misalnya beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki waktu, energi, atau kebebasan untuk terlibat dalam proses kolaboratif yang memakan waktu. Selain itu, masalah yang mungkin muncul situasi dimana beberapa pemangku kepentingan mungkin tidak memiliki keterampilan dan keahlian untuk terlibat dalam diskusi tentang masalah yang sangat teknis.

(ii) Pendukung untuk dan kendala Partisipasi

Keterlibatan pemangku kepentingan sebagian besar opsional, bahkan jika pengadilan atau legislatif mungkin memerlukan teknik kolaboratif. Oleh karena itu, elemen kunci dalam menentukan apakah tata kelola kolaboratif akan efektif adalah pendukung yang harus dimiliki para pemangku kepentingan untuk bekerja sama. Karena sifat keterlibatan yang sebagian besar bersifat sukarela, sangat penting untuk memahami dan menyediakan motivasi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif dan elemen-elemen yang memengaruhi motivasi tersebut (Ansell & Gash, 2008).

(iii) Tingkat Kepercayaan Awal

Adanya sejarah antagonisme atau kerjasama antar pemangku kepentingan akan menghambat atau memfasilitasi kolaborasi. ketika pemangku kepentingan sangat saling bergantung, konflik tingkat tinggi sebenarnya dapat menciptakan pendukung yang

kuat untuk tata kelola kolaboratif. konflik yang tinggi itu sendiri tidak serta merta menjadi penghalang untuk berkolaborasi. Dalam banyak kolaborasi yang berhasil, para pemangku kepentingan telah menyadari bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa terlibat dalam proses kolaboratif dengan pemangku kepentingan lain yang kepentingannya sering bertentangan secara diametral (Ansell & Gash, 2008).

b) Proses Kolaborasi

(i) Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*)

Komunikasi tatap muka langsung antara setiap pemangku kepentingan yang berpartisipasi adalah dasar dari semua jenis tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). *Face-to-face dialogue* melibatkan semua pihak *stakeholders* yang terdiri dari pihak-pihak tokoh pemerintah, adat, dan agama untuk melakukan negosiasi dengan interaksi tatap muka sehingga muncul persamaan ruang dalam memperoleh informasi mengenai *stunting*. *Face-to-face dialogue* diawali dengan setiap pihak dari tokoh pemerintah, adat, dan agama berpartisipasi untuk menghasilkan keputusan dan aksi lanjutan kolaborasi penanggulangan *stunting*.

(ii) Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Pada awal proses kerjasama, terkadang terjadi ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan. Kolaborasi adalah upaya untuk menumbuhkan rasa saling percaya dengan orang lain dan, pada kenyataannya, mencakup lebih dari sekedar kesepakatan antara pemangku kepentingan. Ketika proses kolaboratif awal dilakukan, pembangunan kepercayaan harus dilakukan sesegera mungkin. Hal ini dilakukan untuk menghindari egoisme antar institusi antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

(iii) Proses Komitmen (*Commitment process*)

Tidak ada keraguan bahwa komitmen dan kerja tim berjalan beriringan. Dorongan untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif disebut komitmen (Ansell & Gash, 2008). Untuk menghindari bahaya dari pendekatan kolaboratif, setiap peserta harus menunjukkan komitmen yang kuat. Namun, komitmen adalah konsep yang menantang dalam kerja tim. Pemangku kepentingan harus membuat komitmen untuk melihat koneksi sebagai sesuatu yang segar yang harus dibangun.

(iv) Pemahaman Bersama (*Shared understanding*)

Para pihak yang berpartisipasi dalam proses kerjasama harus menyepakati apa yang ingin mereka capai pada tahap proses yang sama. Pemahaman antara dua pihak ini dapat dicirikan sebagai memiliki misi, sasaran, ideologi, atau tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008). Kesepakatan bersama untuk menafsirkan dan menafsirkan suatu situasi mungkin dihasilkan dari saling pengertian.

(v) Kemenangan Kecil (*Intermediate outcomes*)

Hasil menengah merupakan hasil yang dapat dilihat sebelum mencapai hasil akhir. Hasil yang sedang berlangsung dari proses kolaboratif dilihat sebagai keluaran atau keluaran yang dapat diamati. Ini adalah hasil akhir dari prosedur vital dan krusial dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kesuksesan sebuah kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Ketika tujuan dan keuntungan kerjasama yang layak cukup nyata dan "kemenangan kecil" dapat dicapai, maka hasil kolaborasi lebih mudah untuk berhasil.

c) Kepemimpinan Fasilitatif

Pemimpin ini merupakan sosok yang dapat memerintahkan karena telah mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan. Sedangkan di situasi lain, dalam kondisi konflik tinggi dan kepercayaan rendah, tetapi distribusi kekuasaan

relatif sama dan pemangku kepentingan memiliki pendukung untuk berpartisipasi, maka tata kelola kolaboratif dapat berhasil dilanjutkan dengan mengandalkan mediator yang diterima dan dipercaya oleh masing-masing pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008). Peran fasilitator adalah untuk memastikan integritas proses pembangunan konsensus agar dapat berjalan secara otomatis. Untuk memajukan kolaborasi, pemimpin kolaborasi harus sering melakukan intervensi dengan cara yang lebih terarah untuk membentuk agenda.

d) Desain Institusional

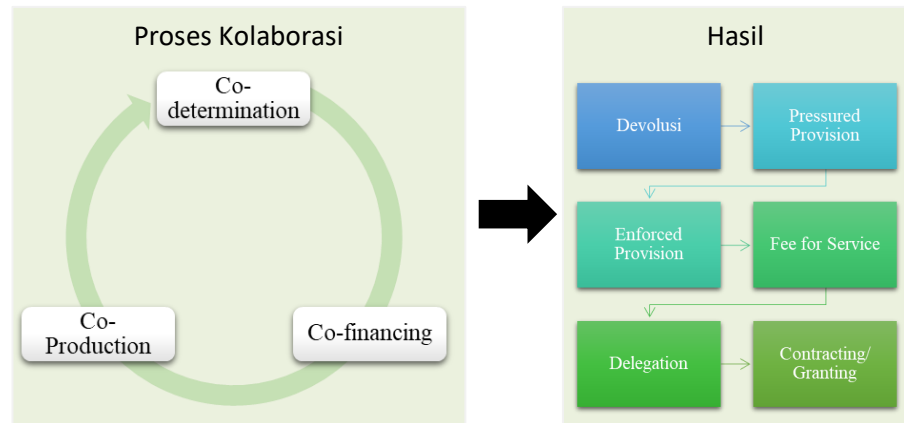
Desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative theory oleh (Ansell & Gash, 2008) menjelaskan kolaborasi antara pemerintah yang terdiri dari lintas sektor pemerintah serta non-pemerintah yang terlibat dalam pengambilan keputusan kolektif secara formal dalam rangka implementasi program/kebijakan. Dalam hal ini, penanggulangan *stunting* merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk pengambilan keputusan penanggulangan *stunting*. *Collaborative theory* dalam hal ini merupakan model yang tepat untuk menganalisis bentuk kerja sama antara pemerintah dan non-pemerintah yang lebih kompleks. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih *collaborative theory* sebagai salah satu teori penelitian.

2) *Country Collaboration Theory*

Country Collaboration Theory mengacu pada situasi ketika negara dan masyarakat bekerja sama untuk menyediakan layanan sosial (White & Robinson, 1998). Dalam prosesnya, terdapat tiga aktivitas mendasar yang terdiri dari *co-determination*, *co-financing*, and *co-production*. Sedangkan hasil dari kolaborasi menurut teori ini dapat berupa devolusi, *pressured provision*, *enforced provision*, *fee for service*, *delegation*,

contracting/granting. Adapun Model kolaborasi dari *Country collaboration theory* ditunjukkan sebagai berikut.



Gambar 2. Model Kolaborasi *Country Collaboration Theory*
(sumber: White & Robinson, 1998)

Co-determination adalah tindakan memutuskan mengenai hal-hal dan cara mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Dalam *co-determination* semua pihak yang termasuk ke dalam *stakeholders* memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan (Jäger et al., 2022). Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan sehingga hasil kolaborasi dapat memberikan dampak yang menyeluruh dan berkelanjutan. *Co-financing* merupakan pembiayaan bersama atas suatu program atau intervensi oleh dua atau lebih pemegang anggaran yang memiliki tujuan sektoral yang berbeda untuk bersama-sama mencapai tujuan masing-masing secara lebih efisien. *Co-production* adalah komitmen proses produksi waktu dan sumber daya yang diputuskan selama tahap penentuan. *Co-production* mengacu pada cara kerja, di mana setiap orang bekerja sama atas dasar kesetaraan untuk menciptakan layanan atau mengambil keputusan yang sesuai untuk mereka semua.

2.2 Penelitian Terdahulu

Memuat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian (sekurang-kurangnya 5 penelitian) di sajikan dalam bentuk tabel dan diurutkan berdasarkan tahun termuda ke tahun tertua.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1	(Resubun et al., 2021)	Metode kualitatif dengan desain studi etnografi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumen, dan FGD. Teknik analisis dengan analisis tematik	model kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu dalam program penanggulangan HIV AIDS di Kota Jayapura, Papua	Sektor ego pada masing-masing lembaga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian apa yang dikerjakan dengan tugas dan fungsinya, lembaga yang terlibat tidak saling terbuka, saling lempar tanggung jawab dan kurang koordinasi. Lemahnya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh jabatan, tidak mampu menangani masalah, dan penganggaran. Model kerjasama sudah ada di masyarakat, namun ditemukan ketimpangan. Sehingga penulis menemukan model dengan menggabungkan model yang ada, sehingga diperoleh model Satu Tungku Tiga Batu sebagai model yang dianggap efektif untuk dapat mengatasi masalah kesehatan khususnya program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Papua.

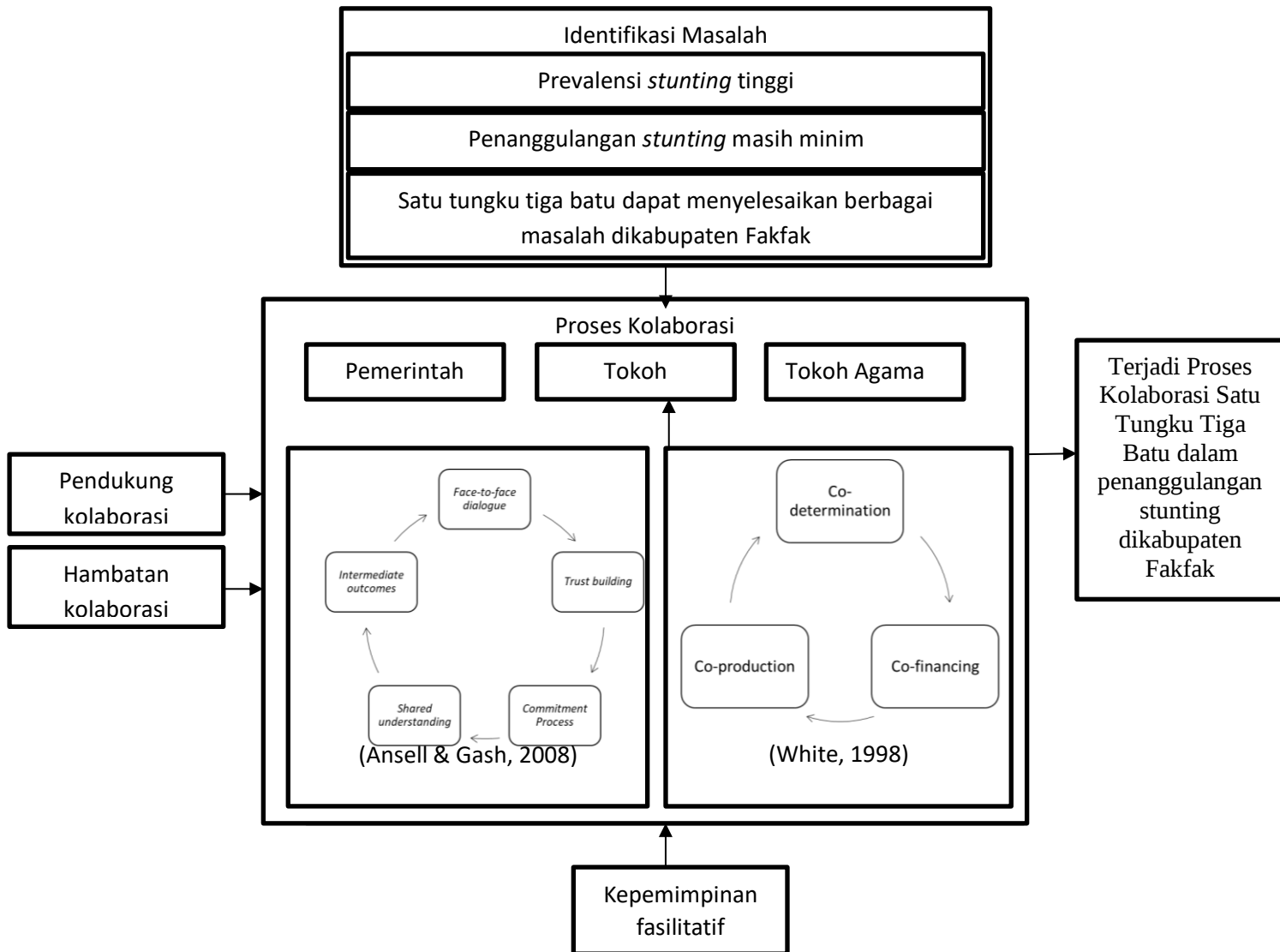
2	(Afandi et al., 2022)	Studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan 6 kriteria kolaborasi menurut Ansell dan Gash	pendekatan Penta-helix untuk menganalisis kolaborasi lima jenis pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kolaboratif stunting.	Semua pemangku kepentingan penta-helix terlibat dalam proses intervensi, tetapi partisipasi mereka dibatasi. Hal ini terlihat dari rendahnya skor konvergensi di kota/kabupaten Jawa Barat. Hal ini juga terlihat ketika kami menerapkan enam kriteria tata kelola kolaboratif yang diusulkan oleh Ansell dan Gash (2007), di mana kolaborasi Penta-helix memenuhi lima kriteria dan gagal memenuhi kriteria keterlibatan penuh selama proses berlangsung.
3	(Warami, 2022)	Pendekatan kualitatif dengan dimensi eksplanatif	tradisi umat Islam Papua dalam upayanya menciptakan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama, yang telah dipraktikkan dan diwariskan sejak lama, dari generasi ke generasi.	1. ideologi sosiofilia. Sebuah ideologi yang cenderung membuat masyarakat memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi dan rasa cinta sosial dalam keluarga. 2. ideologi ekosentrisme. Ideologi yang cenderung bermoral lingkungan dengan penerapan pola untuk kepentingan kesejahteraan manusia; mengupayakan

				keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dalam ekosistem. 3. ideologi antroposentrisme. Ideologi ini cenderung memandang manusia (masyarakat Fakfak) sebagai pusat sistem alam semesta; manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam penataan ekosistem
4	(Abu Nawas et al., 2022)	desain kualitatif fenomenologis. Teknik pengumpulan data dengan catatan lapangan, wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukn dengan (Miles, Huberman, et al., 2014), triangulasi dengan teknik triangulasi data.	Pendekatan filosofi “Satu Tungku Tiga Batu”	Satu tungku-tiga batu adalah filosofi budaya, dimana dalam satu keluarga terdapat dua atau bahkan tiga agama yang berbeda. Namun mereka berbaur satu sama lain dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Terlihat pula dalam dunia pendidikan bahwa agama tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memilih lembaga pendidikan. Mereka menyadari pentingnya pendidikan untuk

				mencerdaskan generasi bangsa
5	(Nur, 2022)	kualitatif dengan tipe fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan model analisis interaktif	Menganalisis berdasarkan filosofi “Satu Tungu Tiga Batu”	kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu” pada masyarakat adat Fakfak yang multi etnik dan multi religi mampu menginternalisasikan nilai-nilai budayanya menjadi nilai yang kohesif dan mencerminkan nilai-nilai dalam karakter warganya yang kuat. Kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu” selain berfungsi untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan, konsep tungku tiga batu juga berfungsi sebagai identitas masyarakat fakfak yang memiliki sikap toleran, mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2024)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 3. Kerangka konsep penelitian
(Sumber: Data diolah peneliti, 2024)

BAB III

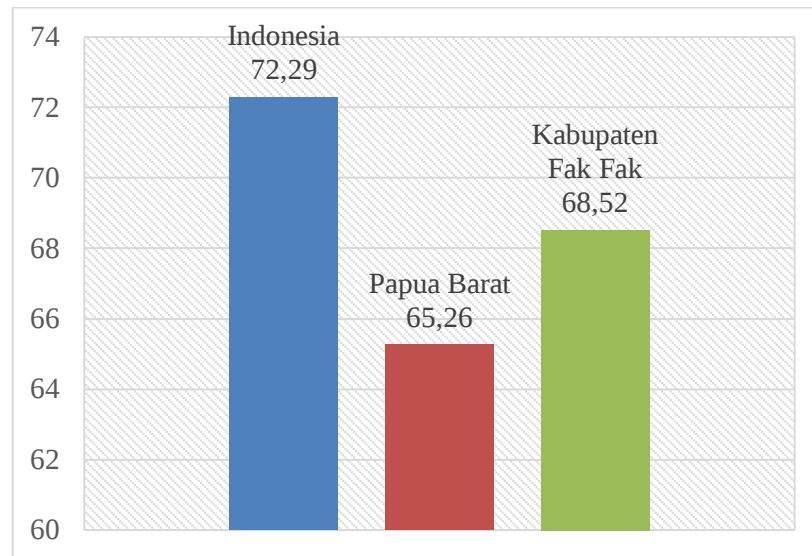
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. (Creswell, 2018) menjelaskan metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian fenomenologi menurut (Creswell, 2018) adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai pengalaman atau fenomena yang dialami oleh seseorang dan pendekatan fenomenologi, penelitian dapat dilakukan dalam setting alamiah, dimana individu tidak terpisahkan dari konteks lingkungannya. Keunggulan penelitian Fenomenologi adalah cara yang sangat baik untuk memahami pengalaman subyektif dan untuk mendapatkan wawasan seputar tindakan dan motivasi orang, memotong asumsi lama dan menantang kebijaksanaan konvensional. Ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori baru, perubahan kebijakan, atau perubahan tanggapan (Rodriguez & Smith, 2018).

3.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan Kabupaten Fakfak sebagai lokasi penelitian adalah karena kondisi prevalensi *stunting* di daerah tersebut termasuk yang daerah dengan prevalensi *stunting* yang tinggi, melebihi tingkat *stunting* nasional (Bappenas, 2022).



Gambar 4. IPM Indonesia, Papua Barat, dan Kabupaten Fakfak Tahun 2021
(sumber: BPS, 2021)

Alasan pemilihan Kabupaten Fakfak sebagai lokasi penelitian secara filosofis adalah karena keunikan budaya toleransi antar kelompok agama yang masih bertahan hingga saat ini. Bentuk kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu” selama ini telah berhasil menjaga perdamaian dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi antar agama dan kepercayaan, sehingga masyarakat bersedia untuk saling bekerja sama dan hidup berdampingan terlepas dari perbedaan yang ada. Kemampuan komunikasi serta kerja sama antar manusia dalam mencapai suatu tujuan merupakan salah satu hal yang membuat manusia menjadi makhluk hidup yang dapat membentuk kehidupan dan membangun peradaban seperti sekarang ini (Harari, 2018). Bentuk kerja sama yang kuat ini merupakan gambaran toleransi yang mulai hilang di tradisi kehidupan modern (Shapouri, 2022), maka bentuk kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu” perlu dipertahankan dan dilestarikan. Peneliti menerapkan penelitian di lokasi yang sama dengan pertimbangan kesesuaian mekanisme yang dirumuskan dengan karakter masyarakat setempat untuk meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi mekanisme kolaborasi.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *purposive sampling*. Berdasarkan pendekatan tersebut, informan penelitian telah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sehingga dapat memenuhi kebutuhan penelitian. Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih partisipan dan informan yang paling cocok untuk menjelaskan masalah dan pertanyaan penelitian (Chun Tie et al., 2019). Peneliti melengkapi hasil observasi awal dengan studi dokumen terkait *stunting* dan kearifan lokal Satu Tungku Tiga Batu. Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu:

1. Informan termasuk bagian dari pihak pemerintah, tokoh adat, atau tokoh agama Kabupaten Fakfak.
2. Informan memiliki sumber daya, pengetahuan, atau modal sosial yang dapat mendukung pelaksanaan Kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu dalam penanggulangan *stunting*.

Tabel 2. Profil Informan Penelitian

Kelompok	Definisi	Stakeholders
Pemerintah	Pihak-pihak yang terdaftar sebagai bagian dari institusi pemerintahan, memiliki pengetahuan pada bidang kesehatan, agama, atau adat, yang memiliki ranah dalam langkah penanggulangan <i>stunting</i> sebagai pembuat kebijakan atau sebagai pelaksana teknis.	1. Wakil bupati/Ketua Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) 2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Fakfak 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Fakfak 4. Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Fakfak 5. Perwakilan Dinas pemberdayaan masyarakat kampung (DPMK) Kabupaten Fakfak 6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB pada DP3AP2KB Kabupaten Fakfak 7. Kepala Distrik Fakfak Barat 8. Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Fakfak

Tokoh Adat	Tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai adat dan budaya Fakfak serta dekat dengan masyarakat Fakfak.	1. Ketua Dewan Adat Mbaham Matta 2. Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat 3. Raja Sekar Pegpeg 4. Ketua Lembaga Adat Perempuan Papua (LAPEPA)
Tokoh Agama	Tokoh masyarakat yang memiliki kedalaman ilmu agama dan dekat dengan masyarakat.	1. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)/NU 2. Ketua klasis GKI Fakfak 3. Ketua klasis GPI Fakfak 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Fakfak 5. Ketua TPW Fakfak

(Sumber: data empiris diolah peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah orang yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 orang yang merupakan delapan perwakilan dari pemerintah, empat perwakilan dari tokoh adat, dan lima perwakilan dari tokoh agama.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil langsung dari lapangan dan informan (Sugiyono, 2018). Sumber data primer penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara secara harfiah merupakan prosedur pertemuan dua orang untuk membahas topik yang telah ditentukan sambil mengubah pengetahuan dan pemikiran melalui aktivitas tanya-jawab (Sugiyono, 2018). Dalam proses wawancara peneliti menyediakan catatan dan alat rekam untuk menyimpan informasi-informasi penting terkait dengan penelitian. Jenis wawancara terdiri dari wawancara terstruktur, semi-struktur, dan terbuka (Sugiyono, 2018).

2. Observasi

Tujuan observasi penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kebiasaan masyarakat dan gambaran yang hanya dapat diketahui dengan melihat situasi secara langsung khususnya. Peneliti melakukan observasi ke kampung-kampung untuk melihat

kehidupan masyarakat Fakfak sehari-hari. Peneliti berusaha melihat langsung peran tokoh adat maupun tokoh agama terhadap masyarakat Fakfak dalam penanggulangan *stunting*, kerja sama yang sudah ada antara pemerintah dan tokoh adat maupun tokoh agama dalam penanggulangan *stunting*, serta kondisi masyarakat Fakfak.

3. *Focus Group Discussion*

Focus group discussion adalah bentuk diskusi tatap muka yang melibatkan tokoh pemerintah, adat, dan agama. Peserta FGD adalah seluruh informan penelitian yang berjumlah 17 orang tidak termasuk peneliti dan pihak-pihak lainnya yang membantu dalam pelaksanaan FGD. Selain peserta, pihak yang juga hadir yaitu Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Moderator, Notulen, dan Peneliti sebagai Observer.

Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari studi dokumen untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti harus mencari informasi tentang objek atau variabel berupa gambar, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sumber lain yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian (Sugiyono, 2018). Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau dari dokumen-dokumen yang ada terkait penanggulangan *stunting*, kearifan lokal “Satu Tungku Tiga Batu” dan data statistik Kabupaten Fakfak, seperti peraturan-peraturan terkait penanggulangan *stunting* yang ada di Kabupaten Fakfak, jurnal-jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan *stunting* serta Kearifan lokal Satu Tungku Tiga Batu.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data sebagai proses sistematis mencari dan menyusun data yang berasal dari hasil wawancara, FGD, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengkategorian, pembagian menjadi unit-unit, sintesis, dan menyusun data menjadi pola, memutuskan apa yang akan dipelajari dan

apa yang penting, menarik kesimpulan yang sederhana untuk dipahami baik oleh penulis maupun pembaca (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan model analisis (Miles, Michael Huberman, et al., 2014) dengan tahapan dimulai dari kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

3.6 Validitas Data

Validitas data yaitu langkah dalam proses memperoleh data penelitian yang membantu mengurangi kesalahan. Subjek penelitian akan memeriksa ulang data yang dikumpulkan untuk penelitian, dan jika perlu, peneliti akan meningkatkan tingkat kepercayaannya terhadap informasi yang dikumpulkan. Validitas data penelitian ini terdiri dari triangulasi metode. Triangulasi penelitian merupakan bentuk pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan pembandingan, baik berdasarkan sumber, metode, maupun teori (Fusch et al., 2018). Triangulasi metode memerlukan penggunaan beberapa metode pengumpulan data oleh peneliti. Observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumen, dan FGD adalah metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan Penelitian

Kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu dalam Penanggulangan Stunting

“Satu Tungku Tiga Batu” merupakan filosofi yang erat dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak. ‘Satu Tungku’ sendiri berarti satu tanah, berada pada satu wadah yang sama. Hal ini menggambarkan kebersamaan dan pusat kehidupan. ‘Tiga Batu’ merepresentasikan tiga kelompok besar yang ada di Kabupaten Fakfak yang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan sudut pandang agama, Satu Tungku Tiga Batu terdiri dari tiga pilar agama yaitu tiga agama yang ada di Kabupaten Fakfak, yang terdiri dari agama Islam, Katolik, dan Protestan. Aplikasi filosofi tersebut di dalam kehidupan masyarakat dijelaskan oleh Ketua MUI Ketika wawancara berlangsung:

“Artinya, saling memberi pertolongan itu tidak dibatasi dengan, misalnya, agama suku, ras, golongan, dan seterusnya tetapi ini berlaku secara umum. Kita saling membantu, tolong menolong untuk kemajuan daerah kita, daerah Fakfak. Ini bagian dari nilai-nilai filosofi kita.” (Moh. Dong Daeng Husein, Ketua MUI Fakfak, Tokoh Agama)

Berdasarkan pemaparan di atas, Satu Tungku Tiga Batu merupakan nilai-nilai kehidupan untuk menjaga kedamaian dimana masyarakat saling tolong menolong, saling mengingatkan tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, suku, ras, golongan, ataupun yang lainnya. Aplikasi filosofi Satu Tungku Tiga Batu tidak hanya diaplikasikan dalam kehidupan beragama, namun juga telah diterapkan secara administratif. Hal ini seperti disampaikan oleh Wakil Bupati Fakfak sekaligus sebagai validasi bahwa:

“Ikatan darah itu membagi di tiga agama ini dan akhirnya secara berkelanjutan dia diterapkan ke pemerintahan. Hal ini kemudian menjadi landasan kuat untuk kolaborasi.” (Yohana Dina Hindom, Wakil Bupati Fakfak, Pemerintah)

Berdasarkan pernyataan di atas, ikatan darah yang mengacu pada rasa kepemilikan sebagai bagian dari keluarga besar Kabupaten Fakfak yang telah mandarah daging, atau sebagai rasa kekeluargaan yang dimiliki. Bagi masyarakat Fakfak, perasaan ini lebih dalam daripada perbedaan agama di antara mereka. Hal

ini kemudian juga dipraktikkan pada aspek pemerintahan untuk kemudian menjadi landasan kuat untuk kolaborasi. Sesuai dengan filosofi Satu Tungku Tiga Batu, terdapat tiga pilar yang menjunjung satu wadah kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal agama, tiga pilar itu adalah agama Islam, Kristen, dan Protestan. Dalam hal pemerintahan, pilar ini terdiri dari tokoh pemerintah, adat, dan agama.

Nilai Satu Tungku Tiga Batu merupakan kearifan lokal asli Kabupaten Fakfak yang merupakan peninggalan turun temurun sejak zaman leluhur, sehingga telah menjadi kebudayaan yang kuat di tengah masyarakat Fakfak. Masyarakat Fakfak memiliki toleransi dan persaudaraan yang kuat yang menembus batas suku, ras, dan agama sehingga tidak mudah terpecah belah. Kuatnya persaudaraan yang muncul dengan penerapan nilai-nilai Satu Tungku Tiga Batu telah menarik banyak peneliti (Alfons Pandie, 2018; Resubun et al., 2021; Rusyaid et al., 2022; Saugi et al., 2022).

Pernyataan diatas juga didukung sekaligus divalidasi Ketika proses FGD berlangsung oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas kesehatan (Dinkes) menjelaskan mengenai permasalahan *stunting* yang ada di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

“Kalau kita mau bilang ketersediaan pangan, sebenarnya di Fakfak ini sangat kaya. Bahkan, sekarang tidak punya tanah juga bisa tanam sayur. Tetapi, seperti kesadaran dan kebiasaan kalau makan bukan asal kenyang, tapi tidak melihat dari komposisinya. Remaja putri saja suruh minum obat tambah darah itu susah sekali. Padahal itu kan pencegahan. Kemudian, untuk calon pengantin yang harus memeriksakan kehamilan. Setelah pengurusan syaratnya harus pemeriksaan kesehatan, baru dilaksanakan. Jadi, memang kesadaran itu memang belum ada. Di sini juga masih banyak kehamilan yang tidak diinginkan, bukan cuma yang tidak menikah saja, atau anak remaja saja, tetapi juga yang sudah 40-an tahun. Masih ada juga yang mau melahirkan di rumah, tidak mau ke Puskesmas, tidak mau ke rumah sakit. Begitu pula pada saat Posyandu, masih belum 100%. Kesadaran masyarakatnya masih berkurang. Jadi memang masih kadang juga sudah tidak datang ke Posyandu, didatangi sama petugas ke rumah begitu kabur lagi, sembunyi, tutup pintu. Jadi, memang masih pola pikir, pola hidup, perilaku masyarakat yang perlu kita rubah.” (Dewi Kunde, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas kesehatan Kabupaten Fakfak, Pemerintah).

Pendapat dari Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dari Dinkes Kabupaten Fakfak tersebut memang terbukti benar adanya dimana pola pikir, pola hidup, perilaku masyarakat disana cenderung masih kurang. Hal ini

dibuktikan sekaligus divalidasi berdasarkan dokumentasi yang didapat secara langsung dilapangan yang menunjukkan kegiatan posyandu bagi Balita yang masih sepi peminat padahal jumlah Balita yang cenderung cukup banyak seperti gambar dibawah ini :



Gambar 5. Kegiatan Posyandu yang Sepi Peminat
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Tabel 3. Data Jumlah Balita Terdaftar Posyandu

No	Posyandu	Balita		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kombah	17	10	27

(Sumber : Puskesmas Sekban, Kabupaten Fakfak)

Data diatas menunjukkan kegiatan posyandu yang sedang berlangsung, namun terlihat sepi peminat dari kalangan masyarakat. Padahal sesuai data pada tabel 7 menunjukkan seharusnya jumlah balita adalah 27 orang, namun secara realita hanya 2-3 balita saja yang hadir untuk menjalani pemeriksaan pada posyandu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat memang belum sepenuhnya ada khususnya mengenai pentingnya Kesehatan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat beberapa penyebab *stunting* di Kabupaten Fakfak. Pertama, adalah kebiasaan makan yang kurang seimbang. Meskipun ketersediaan pangan di Fakfak cukup baik, namun pola makan yang tidak seimbang dan kurang memperhatikan komposisi gizi masih menjadi masalah yang mengakibatkan *stunting*. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang

kesehatan dan gizi. Beberapa keluarga masih bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan kurang memahami pentingnya asupan gizi yang cukup untuk anak-anak. Pola makan yang seperti itu berisiko menyebabkan anak mengalami *stunting*. Berdasarkan pemaparan di atas, penyebab *stunting* lebih banyak diakibatkan oleh kebiasaan dan pola pikir masyarakat. Masyarakat sering kali kurang memerhatikan pemenuhan gizi anak dan ibu, dan memiliki kesadaran yang rendah untuk datang ke fasilitas kesehatan. Secara ekonomi, Kabupaten Fakfak termasuk daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Namun, sumber daya alam di Kabupaten Fakfak masih lebih terjaga sehingga mudah bagi masyarakat Kabupaten Fakfak untuk mencari bahan pangan langsung dari alam di sekitarnya. Permasalahan yang berisiko menyebabkan terjadinya *stunting* terutama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan, kebersihan, dan untuk memonitor perkembangan janin di fasilitas kesehatan.

Proses Kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu

Penelitian ini menerapkan teori *collaborative governance theory* dan *country collaboration theory*. Sebelum melaksanakan proses kolaborasi, peneliti mengidentifikasi kondisi awal kolaborasi. Terdapat dua aspek yang dianalisis, yaitu sejarah kerja sama dan asimetri kekuatan. Pada aspek pertama, peneliti menganalisis mengenai sejarah kerja sama yang pernah dilakukan pada bidang selain penanggulangan *stunting*. Gambaran mengenai kondisi positif atau kondisi yang kurang kondusif antara pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu diperlukan untuk menentukan langkah pola proses kolaborasi yang akan dilaksanakan. Apabila sejarah kerja sama antara tiga tokoh tersebut negatif, maka akan diperlukan langkah intervensi dalam kolaborasi. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa sejarah kerja sama antara ketiga pilar tersebut memiliki sejarah yang positif.

Sejarah kerja sama yang positif ditunjukkan dari hasil wawancara dari informan tokoh pemerintah, adat, dan agama. Dari sudut pandang pemerintah, disampaikan oleh Wakil Bupati Fakfak:

“Hubungan sejarah itu positif sekali. Positif karena hubungan darah itu mengikat kita. Jadi walaupun agama itu berbeda, tapi hubungan darah itu

menyatukan kami.” (Yohana Dina Hindom, Wakil Bupati Fakfak, Pemerintah)

Berdasarkan pernyataan di atas, sejarah kerja sama terhadap tiga pilar ini memiliki hubungan yang positif. Hal ini karena adanya hubungan darah sebagai keluarga besar Fakfak. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB pada DP3AP2KB Kabupaten Fakfak Ketika FGD berlangsung:

“Baik sekali, positif. Karena misalnya kita ada kegiatan doa bersama pasti saya hubungi Pendeta, atau pak imam untuk memberi ceramah pendek.” (Siti Rahayaan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB pada DP3AP2KB Kabupaten Fakfak, Tokoh Pemerintah)

Peneliti juga menganalisis pandangan dari tokoh adat sekaligus sebagai validasi Ketika proses FGD berlangsung. Ketua Dewan Adat Mbaham Matta menyampaikan:

“Selama beberapa tahun ini sudah cukup baik. Beberapa tahun terakhir ini kemitraan ini dibangun. Cuma perlu untuk di terus dibangun lagi, dijaga, dirawat.” (Demianus Tutuop, Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Tokoh Adat)

Berdasarkan pernyataan di atas, pemerintah memandang kerja sama dengan tokoh adat dan agama memiliki sejarah yang positif terjalin kerja sama yang cukup baik antara tokoh pemerintah, adat, dan agama. Berdasarkan pernyataan di atas, tokoh agama memandang bahwa pemerintah bersikap terbuka terhadap kepentingan-kepentingan agama. Hal ini menciptakan kerja sama yang baik antara tokoh pemerintah dan agama.

Pandangan dari tokoh adat mengenai asimetri kekuatan disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Adat sebagai berikut:

“Pemerintah ya lebih lebih kuat dalam pengertian karena pemerintah itu regulator, mereka juga pengelola anggaran. Dari negara program seluruhnya formalnya dari pemerintah.” (Willy Hegemur, Sekretaris Lembaga Adat, Tokoh Adat)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan terbesar dari ketiga pilar kolaborasi. Hal ini karena pemerintah merupakan regulator

dan pengelola anggaran. Pemerintah juga yang merancang program-program di Kabupaten Fakfak. Hal senada juga disampaikan dari tokoh agama sebagai berikut:

“Kalau dari ketimpangan jelas ada. Apabila kita dari agama ya. Ini tidak punya dukungan biaya, yang punya biaya itu pemerintah.” (Moh Dong Daeng Husein, Ketua MUI, Tokoh Agama)

Berdasarkan pernyataan di atas, masih terdapat asimetri kekuatan. Hal ini karena tokoh adat dan agama tidak memiliki dukungan biaya, sedangkan pemerintah punya. Hal ini menimbulkan asimetri kekuatan dimana pemerintah memiliki kekuatan terbesar dibanding tokoh adat dan agama.

“Tidak ada unsur keterlibatan unsur adat dan agama secara terstruktur, kami hanya pelengkap saja nampaknya. Maka kami kasih masukan barangkali itu perlu dievaluasi.” (Willy Hegemur, Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat, Tokoh Adat)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tokoh adat dan agama tidak dilibatkan secara terstruktur, sehingga tidak memiliki peran aktif dalam usaha penanggulangan *stunting*. Pernyataan di atas juga menunjukkan keinginan tokoh adat agar kondisi tersebut dievaluasi sehingga tokoh adat dan agama diikutsertakan secara struktural dalam penanggulangan *stunting*.

Secara menyeluruh, kondisi awal dalam kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu ditunjukkan memiliki kerja sama yang baik, namun masih terdapat asimetri kekuatan. Selanjutnya, peneliti melaksanakan proses kolaborasi yang terdiri dari diskusi tatap muka dengan pendekatan Wewowo, *co-determination* yang termasuk ke dalam proses diskusi tatap muka, membentuk kepercayaan, *co-financing* yang termasuk ke dalam membentuk kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, kemenangan kecil, dan *co-production*.

a. Diskusi Tatap Muka, Co-Determination

Diskusi tatap muka dilakukan dengan pendekatan Wewowo. Wewowo merupakan bentuk diskusi tatap muka dengan melibatkan banyak orang sekaligus yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Wewowo merupakan salah satu budaya asli masyarakat Fakfak.



Gambar 6. Pelaksanaan Wewowo dengan Alas Tikar, Kain Putih, Nahahara, dan Duduk Melingkar
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Diskusi dengan pendekatan Wewowo dilaksanakan dengan duduk di lantai beralaskan tikar. Hal ini merupakan kebiasaan yang telah ada dari zaman nenek moyang. Masyarakat Fakfak memiliki keeratan sosial yang tinggi, sehingga telah terbiasa untuk berkumpul dan berbincang di satu tempat.

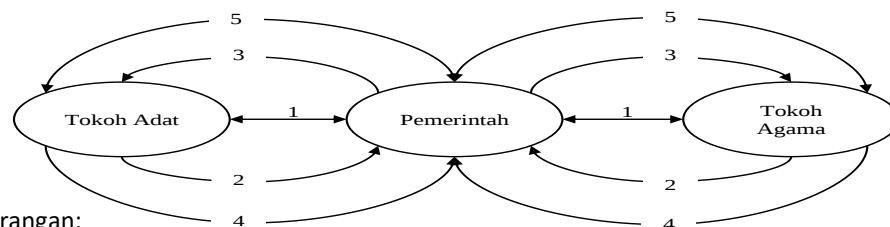
Selain dengan penggunaan tikar, ciri khas Wewowo adalah adanya kain putih yang berada di tengah-tengah peserta. Kain putih merupakan simbol untuk kesucian. Hal ini berarti ketika orang-orang yang hadir dalam Wewowo dan berbicara dalam proses diskusi, mereka melakukannya secara jujur, menghilangkan intensi pribadi dan emosi negatif.

Salah satu hal yang juga harus ada dalam Wewowo adalah 'Nahahara' yang berarti ramah tamah. Hal ini disimbolkan dengan berbagai sajian atau jamuan adat, baik berupa sirih, pinang, maupun tembakau. Diskusi juga dilakukan dengan membentuk lingkaran atau huruf 'O'. Pengambilan keputusan atau akhir kesepakatan dalam Wewowo juga ditandai dengan *toast* atau bersulang dengan cangkir.



Gambar 7. *Toast Cangkir* sebagai Tanda Kesepakatan
(Sumber: data primer diolah peneliti)

Wewowo dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mencapai proses kolaborasi yang ideal. Wewowo merupakan bentuk diskusi tatap muka yang juga mendorong pola proses kolaborasi lain. Selain *face-to-face dialogue* juga terjadi, juga sebagai bentuk yang dalam bahasa (White & Robinson, 1998) yakni *co-determination* dimana semua pihak yang terlibat dapat memberikan pendapatnya secara terbuka dan tidak ada hambatan komunikasi dalam kolaborasi. Pelaksanaan Wewowo dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian diskusi yang diilustrasikan pada pola berikut.



Keterangan:

1. Komunikasi mengenai permasalahan *stunting*
2. Usulan perbaikan regulasi dengan memasukkan tokoh adat dan agama ke dalam Perbup No. 62 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi
3. Respon pemerintah dengan meminta penjelasan mengenai peran serta komitmen tokoh adat dan agama terhadap penanggulangan *stunting*
4. Respon tokoh adat dan agama mengenai peran dan komitmennya sebagai perantara pemerintah dan pelayan masyarakat
5. Menuju *trust building* dan komitmen revisi Perbup No. 62 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dengan memasukkan peran tokoh adat dan agama secara struktural

Gambar 8. Ilustrasi Tahap Diskusi Tatap Muka Penanggulangan *Stunting*
(Sumber: Data primer diolah peneliti)

Diskusi tatap muka merupakan bentuk komunikasi dalam kolaborasi yang paling efektif (Schwartz, 2016). Hal ini karena diskusi tatap muka merupakan

bagian terpenting dari kolaborasi (Pritzlaff-Scheele & Nullmeier, 2018). Diskusi tatap muka dapat meruntuhkan stereotip, hambatan-hambatan komunikasi, dan mengeksplorasi keuntungan bersama (Ansell & Gash, 2008).

b. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan dalam kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu untuk penanggulangan *stunting* terbentuk karena adanya sejarah kerja sama yang positif di masa lalu dan didorong dengan adanya komunikasi dua arah yang terjadi sejak pelaksanaan Wewowo. Kepercayaan yang muncul dari sejarah kerja sama ini dijelaskan oleh Ketua MUI:

“Kepercayaan antara ketiga komponen ini memang di pupuk dari sejak awal perjalanan sampai dengan saat ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, dari sisi agama, kemudian adat mempercayai bahwa itu sangat terbaik untuk masyarakat maupun umat di Kabupaten Fakfak.” (Moh. Dong Daeng Husein, Ketua MUI Kabupaten Fakfak, Tokoh Agama)

Berdasarkan pernyataan di atas, ditunjukkan bahwa terdapat kepercayaan antara tiga komponen yang terdiri dari tokoh pemerintah, adat, dan agama yang telah terjadi sejak awal hingga saat ini. Tokoh adat dan agama memiliki kepercayaan bahwa perilaku pemerintah adalah yang terbaik untuk masyarakat maupun umat di Kabupaten Fakfak. Hal ini merupakan bagian dari nilai-nilai Satu Tungku Tiga Batu yang mengutamakan kedamaian dan kerukunan antar masyarakat dan tingginya nilai persaudaraan sehingga tidak ada curiga karena menganggap semua masyarakat Fakfak sebagai satu keluarga besar.

Adanya sejarah kerja sama yang positif ini kemudian didorong dengan pelaksanaan tahap pertama dalam proses kolaborasi, yaitu diskusi tatap muka dan *co-determination*. Artinya, kepercayaan bersifat dua arah yang hanya dapat terbentuk jika kedua pihak dapat terbuka untuk memberikan kepercayaannya. Bentuk timbal balik dalam hal ini merupakan keterbukaan dari pihak-pihak yang terlibat. Dari pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan keterbukaan informasi, sumber daya, dan sikap, serta kesediaan untuk menerima masukan dari pihak lainnya. Sedangkan dari tokoh adat dan agama, hal ini ditunjukkan dengan pendapat yang jujur dan terbuka, serta kesediaan dan motivasi untuk mendampingi pemerintah dalam usaha penanggulangan *stunting*.

c. Komitmen terhadap Proses (*Commitment-to-Process*), *Co-Financing*

Komitmen terhadap proses sendiri terdiri dari tiga aspek utama yang terdiri dari pengakuan saling ketergantungan, berbagi kepemilikan (*co-financing*), dan keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama. Aspek pertama, yaitu pengakuan saling ketergantungan dapat dilihat dari peran masing-masing tokoh dalam penanggulangan *stunting* serta kesamaan tujuan yang dimiliki oleh semua tokoh untuk kesejahteraan masyarakat. Tokoh pemerintah, adat, dan agama memiliki peran yang saling mengisi dalam penanggulangan *stunting*. Pemerintah perlu melibatkan tokoh adat dan agama dalam menentukan kebijakan agar kebijakan tersebut tepat guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ketua Dewan Adat Mbaham Matta menyampaikan Ketika proses wawancara bahwa:

“Pemerintah produknya adalah pelayanan publik. Bicara adat dengan agama itu produknya etika dan norma. Peran kita adalah mendorong nilai-nilai, norma yang ada di dalam adat, sehingga bisa dipakai di dalam pelayanan publik.” (Dominikus Tutuop, Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Tokoh Adat)

Berdasarkan pernyataan di atas, masing-masing *stakeholders* memiliki perannya masing-masing. Pemerintah memiliki peran dalam wujud pelayanan publik. Tokoh agama berperan dalam wujud etika dan norma. Sedangkan, tokoh adat berperan dalam wujud nilai-nilai dan norma adat. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh pemerintah, adat, dan agama sama-sama memiliki peran untuk melayani publik dengan cara yang berbeda dan saling melengkapi.

Tabel 4. Hasil Kondensasi Dimensi *Co-Financing*

<i>Stakeholders</i>	<i>Co-financing</i>
Pemerintah	Menyediakan data dan informasi kesehatan; Mencari dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dari sisi anggaran maupun regulasi untuk penanggulangan <i>stunting</i> di Kabupaten Fakfak
Tokoh Adat	Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan fasilitas kesehatan; Sebagai mitra pemerintah dan kontrol sosial

pemerintah; Meneruskan edukasi dan kebijakan pemerintah

Tokoh Agama Mimbar untuk edukasi masyarakat; Pengaruh untuk menganjurkan orang tua dan calon orang tua untuk mengadopsi gaya hidup sehat serta mendorong untuk ke fasilitas kesehatan

(Sumber: data primer diolah peneliti)

Aspek ketiga yaitu keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama, Hal ini terutama ditunjukkan dalam Wewowo yang telah dilaksanakan. Tokoh adat dan agama dalam Wewowo menunjukkan antusiasme yang dalam mendukung usaha penanggulangan *stunting* di Kabupaten Fakfak.

d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Tahap ini terdiri dari dua aspek, yaitu tujuan yang jelas dan pemahaman terhadap definisi masalah umum. Kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu untuk penanggulangan *stunting* telah memberikan identifikasi mengenai tujuan kolaborasi yang dilaksanakan, yaitu untuk penanggulangan *stunting*. Bagi tokoh pemerintah, tujuan ini merupakan bagian dari strategi nasional yang perlu dicapai. Sedangkan bagi tokoh adat dan agama, penanggulangan *stunting* merupakan bagian dari tujuan utama mereka untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Fakfak. Tokoh adat dan agama mengenal tujuan ini dalam kalimat ‘Fakfak Tersenyum’ seperti disampaikan oleh Sekretasi LMA:

“kita lagi semangat bicara Fakfak Maju, Fakfak tersenyum.
...kalau saya sih Fakfak sehat dulu baru Fakfak senyum. Bagaimana senyum kalau sakit?” (Willy Hegemur, Sekretaris Lembaga Masyarakat adat, Tokoh Adat).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tokoh adat sedang menggerakkan masyarakat melalui moto ‘Fakfak Maju, Fakfak Tersenyum’. Moto ini mengacu pada kemajuan masyarakat di berbagai bidang dan peningkatan kebahagiaan masyarakat. Pernyataan tersebut dibuktikan sekaligus sebagai validitas data bahwa sejalan dengan visi dan misi kabupaten Fakfak yang tertuang pada poster gambar dibawah ini :



Gambar 9. Poster Visi dan Misi Kabupaten Fakfak
(Sumber : Dokumentasi Kabupaten Fakfak)

Aspek kedua adalah pemahaman terhadap definisi masalah umum. Masalah umum dalam hal ini merupakan *stunting*. Sekretaris LMA Ketika sesi wawancara menyampaikan:

"kesadaran bahwa ini krisis, satu. Pemerintah harus sadar, masyarakat juga harus sadar bahwa ini krisis kesehatan yang penting di tangani. kalau kita sadar bahwa ini bahaya, maka pasti dong kita akan berupaya untuk mengatasi." (Willy Hegemur, Sekretaris Lembaga Masyarakat adat, Tokoh Adat).

Berdasarkan nilai Satu Tungku Tiga Batu, terdapat pemahaman yang juga perlu dimiliki oleh *stakeholders*, yaitu memahami manusia merupakan makhluk sosial yang harus berbagi. Pemahaman ini sesuai karakteristik masyarakat Fakfak dalam menyelesaikan masalah *stunting* perlu dilakukan secara bersama-sama, saling menopang dan saling mengingatkan. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Fakfak pada pelaksanaan FGD:

"Karena nilai-nilai dalam kearifan lokal itu hidup bersama, saling tolong-menolong, termasuk saling mengingatkan manakala ada satu stakeholder, satu unsur atau satu elemen yang biasanya bersifat apatis, kemudian tidak

memberi perhatian terhadap masalah pembangunan, termasuk *stunting*. Kita pasti saling mengingatkan bahwa ini kepedulian kita bersama, bukan hanya satu *stakeholder*.” (Moh. Dong Daeng Husein, Ketua MUI Kabupaten Fakfak, Tokoh Agama).

Pernyataan dari ketua MUI tersebut diperkuat sekaligus divalidasi berdasarkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 62 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan *stunting* terintegrasi yang secara khusus tercantum pada Bab II pasal 3 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Pasal 3

Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi bertujuan:

- a. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi;
- b. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, serta koordinasi yang baik;
- c. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing;
- d. Membangun dan mengoptimalkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Daerah; dan
- e. Menjadi Panduan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah untuk penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Gambar 10. Peraturan Bupati Fakfak No 62 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Fakfak, Papua Barat)

Berdasarkan pernyataan FGD dan validitas berdasarkan dokumen di atas, salah satu nilai Satu Tungku Tiga Batu adalah hidup bersama dimana masyarakat saling tolong menolong dan saling mengingatkan dalam semua hal, termasuk dalam pembangunan. Elemen masyarakat seperti tokoh pemerintah, adat, dan agama bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan, termasuk menanggulangi *stunting*. Sehingga ketika ada yang bersikap apatis, maka elemen lainnya perlu mengingatkan sebagai bentuk kepedulian bersama.

Berdasarkan pernyataan di atas, perlu ada kesadaran dari pemerintah dan juga masyarakat bahwa *stunting* di Kabupaten Fakfak telah mencapai tingkat krisis. Pemahaman mengenai krisis *stunting* dapat mendorong kesadaran akan urgensi penanggulangan *stunting*. Hal ini kemudian membangkitkan kesadaran akan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan *stunting*.

e. Co-Production

Co-production dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* dilakukan untuk mengumpulkan kekuatan yang berbeda dan saling melengkapi antara tokoh pemerintah, adat, dan agama. Hasil analisis peneliti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Kondensasi Dimensi *Co-Production*

<i>Stakeholders</i>	<i>Co-Production</i>
Pemerintah	Surat keputusan sebagai alat kolaborasi; Membangun komunikasi melalui platform <i>chatting online</i> ; Data sebagai evaluasi; Adanya sekretariat
Tokoh Adat	Membentuk tim kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan; Tim penanggulangan <i>stunting</i> berkelanjutan setelah program selesai dengan menggerakkan masyarakat dari tokoh adat dan agama; Ada kesepakatan kerja sama yang jelas antar tokoh pemerintah, adat, dan agama yang menunjukkan tugas dan peran, fungsi masing-masing dan porsi yang jelas; perlu ada standar SOP yang diikuti oleh semua <i>stakeholders</i>
Tokoh Agama	Musyawarah bersama; Tokoh agama memberikan masukan dan pandangan dalam mencegah <i>stunting</i> ; <i>Bottom up</i> dengan tupoksi yang jelas; lokasi musyawarah dilaksanakan secara bergantian

(Sumber: data primer diolah peneliti)

Pembagian tugas dan peran antara Tokoh Pemerintah, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama sangat penting dalam proses kolaborasi untuk penanggulangan *stunting* di Kabupaten Fakfak. Setiap komponen masyarakat harus memainkan peran dan mengambil tugas yang sesuai dengan peran masing-masing. Tokoh agama bertanggung jawab dalam melakukan edukasi dan ceramah pada umat beragama melalui khotbah di atas mimbar atau kegiatan keagamaan, serta membina keagamaan untuk remaja masjid dan gereja yang akan menikah. Pemerintah dapat melaksanakan langkah strategis penanggulangan *stunting*

yang telah dirancang sebelumnya dengan melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Dengan adanya pembagian tugas dan peran yang jelas, proses kolaborasi antara ketiga komponen masyarakat ini dapat berjalan secara efektif dan optimal dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Fakfak.

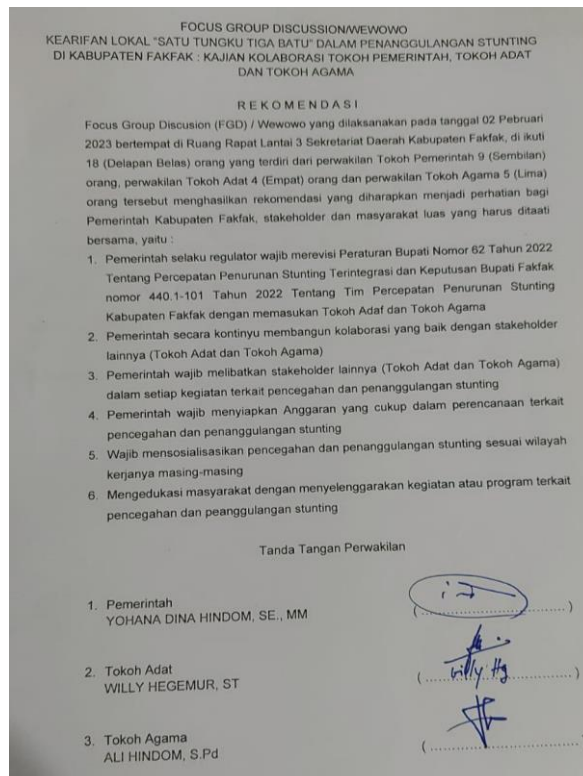
f. Hasil Menengah (*Intermediate Outcome*)

Hasil menengah merujuk pada pencapaian yang relatif kecil tetapi signifikan dalam rangkaian implementasi kebijakan yang lebih besar. Hasil menengah dapat diartikan sebagai capaian terhadap tujuan yang sudah ditetapkan, bahkan jika belum mencapai tujuan akhir yang lebih besar. Hasil menengah terdiri dari kemenangan kecil dan rencana strategis. Dalam penelitian ini, rencana strategis yang diputuskan dalam proses kolaborasi yang juga merupakan kemenangan kecil penelitian.

Hal ini sesuai dengan keinginan dari seluruh *stakeholders* untuk membangun tim yang terdiri dari tokoh pemerintah, adat, dan agama dalam tim penanggulangan *stunting*. Hal ini seperti dinyatakan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Fakfak pada pelaksanaan FGD :

“Saya bantu dorong, yang penting ini kalau ini hasilnya bagus, intinya bagus. Saya akan dorong dengan kita masukkan (tokoh adat dan agama) ke dalam tim.” (Dewi Kunde, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Fakfak, Pemerintah)

Pernyataan di atas menggambarkan dukungan dari tokoh pemerintah untuk melibatkan tokoh adat dan agama secara strategis dan regulatif dalam usaha penanggulangan *stunting*. Aktualisasi kemenangan kecil dalam penelitian ini dicapai dengan komitmen memasukkan tokoh adat dan agama ke dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Fakfak dan revisi Peraturan Bupati Fakfak Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 440.1- 101 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 ini. Hal tersebut telah disetujui oleh Pemerintah dan telah disahkan dalam perjanjian tertulis yang ditunjukkan sebagai berikut.



Gambar 11. Perjanjian Tertulis sebagai Bentuk Kemenangan Kecil Kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu
(Sumber: Data sekunder, 2024)

Berdasarkan perjanjian tersebut, terdapat beberapa poin rekomendasi yang dinyatakan sebagai bentuk komitmen dan kerja sama antara Tokoh pemerintah, adat, dan agama. Kemenangan kecil yang dicapai ini, di sisi lain, masih merupakan tahap awal. Secara administratif, pihak pemerintah melalui pemerintah Wakil Bupati telah memberikan persetujuannya. Namun, perubahan struktural yang melibatkan tokoh adat dan agama secara hukum harus melewati proses birokrasi yang membutuhkan waktu.

g. Kepemimpinan Fasilitatif

Peneliti melakukan analisis untuk menentukan kepemimpinan fasilitatif yang diterima oleh semua pihak, termasuk Tokoh pemerintah, adat, dan agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan, kepemimpinan fasilitatif yang dipilih ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Kondensasi Data Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif

<i>Stakeholders</i>	Kepemimpinan Fasilitatif yang Dipilih
Pemerintah	Pemerintah merangkul dan memfasilitasi kegiatan penanggulangan <i>stunting</i> ; Setiap <i>stakeholder</i> memiliki ranah dan pengaruhnya di wilayah masing-masing sehingga sejajar; Ibu Wakil Bupati;
Tokoh Adat	Tokoh adat dan agama bergerak di bawah perlindungan pemerintah; pemerintah memiliki andil yang lebih besar karena ada anggaran, data, serta wewenang hukum; Kolaborasi peran pemimpin antara pemerintah dan tokoh adat dengan agama;
Tokoh Agama	Pemerintah di atas ketiga <i>stakeholders</i> yang memiliki anggaran, fasilitas, dan sumber daya serta keabsahan untuk melakukan perbaikan; Tokoh pemerintah, adat, dan agama memiliki posisi yang sama, jadi kepemimpinan bersama; tokoh adat dan agama sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

(Sumber: data primer diolah peneliti)

Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi penanggulangan *stunting* oleh ketua TPPS sangat penting dalam mempromosikan kolaborasi di antara anggota tim dan memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi. Selain itu, ketua TPPS harus membantu anggota tim mengatasi masalah atau hambatan dalam mencapai tujuan bersama dan memotivasi mereka untuk terus berpartisipasi dalam kolaborasi.

Dukungan dan Hambatan dalam Proses Kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu

Peneliti telah melakukan analisis mengenai pendukung dalam kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu yang terdiri dari dua hal, yaitu kesadaran aktor kolaborasi mengenai perannya untuk mendorong kesehatan masyarakat Kabupaten Fakfak dan sejarah hubungan kerja sama yang positif.

a. Dukungan dalam kolaborasi

Keterlibatan tokoh adat dan agama dalam mekanisme kerja penurunan atau penanggulangan *stunting* di Kabupaten Fakfak diharapkan dapat menghasilkan sinergi dan kerjasama yang lebih baik antara seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini, permasalahan *stunting* tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan menjadi masalah seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Tokoh adat dan agama sebagai sosok pemimpin kelompok-kelompok di masyarakat memiliki pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan penanggulangan *stunting* yang berkelanjutan. Peneliti telah melakukan analisis mengenai pendukung dalam kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu yang terdiri dari tiga hal, yaitu kesadaran akan tujuan bersama, sejarah hubungan kerja sama yang baik, dan pembangunan tim.

Dalam konteks kolaborasi penanggulangan *stunting*, sistem dan pembangunan tim yang baik dapat menjadi pendukung yang kuat bagi tokoh pemerintah, adat, dan agama untuk terus terlibat dan memberikan kontribusi yang maksimal. Sebuah sistem yang baik harus didukung oleh komunikasi yang terbuka dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat, termasuk tokoh adat dan agama. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi yang efektif, yang kemudian akan memotivasi semua pihak untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya penanggulangan *stunting*. Selain itu, pembangunan tim yang baik juga penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang peran, tugas, dan kewajiban masing-masing, serta memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dengan demikian, pendukung ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kolaborasi dan memastikan bahwa tujuan bersama dalam penanggulangan *stunting* dapat dicapai dengan lebih baik.

b. Hambatan dalam Proses Kolaborasi

Selain pendukung bagi kolaborasi, penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* melalui kolaborasi Satu Tungku Tiga

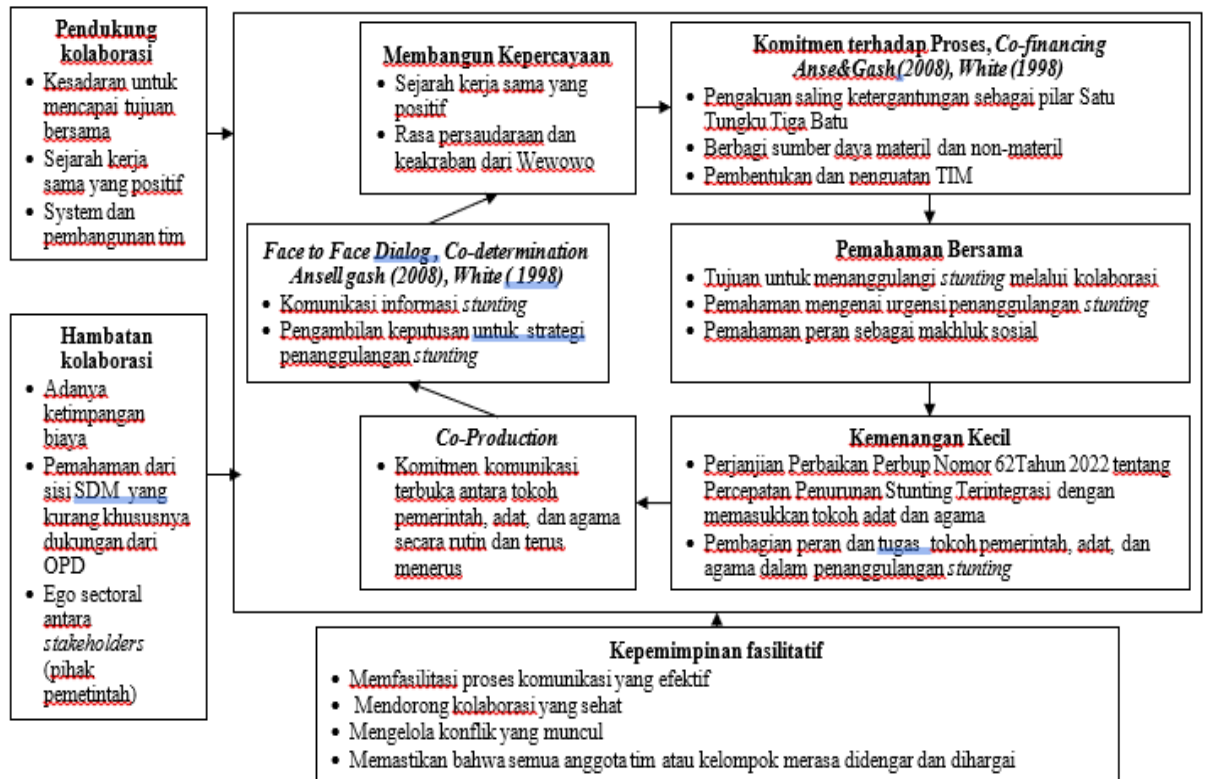
Batu menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Tiga hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah asimetri kekuatan, SDM, dan ego sektoral.

Asimetri kekuatan terjadi karena pemerintah sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kolaborasi, memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan dengan tokoh adat dan agama. Hal ini mengakibatkan tokoh adat dan agama kurang aktif dalam memberikan kontribusi pada proses kolaborasi. Komunikasi yang terjadi juga bersifat satu arah, yaitu dari pemerintah ke tokoh adat dan agama, sehingga tidak terjadi diskusi yang mendalam antara kedua belah pihak.

Hambatan kedua adalah SDM, dimana ditemukan bahwa OPD teknis yang terlibat dalam proses kolaborasi kurang memahami tugas dan kewenangan masing-masing. Penanggulangan *stunting* pada dasarnya merupakan bagian kewenangan dan ranah dari DP3AP2KB. Namun, dalam praktiknya, tugas penanggulangan *stunting* justru lebih banyak diberikan kepada Dinas Kesehatan yang lebih memahami kondisi spesifik (kesehatan). Padahal, penanggulangan *stunting* juga perlu menyentuh bagian sensitif (sosial dan budaya). Hal tersebut menunjukkan masih belum adanya kesesuaian antara pembagian tugas dan ranahnya terhadap praktik penanggulangan *stunting*. Hal ini dapat menghambat proses kolaborasi, karena terjadi ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan peran masing-masing pihak dalam upaya penanggulangan *stunting*.

Hambatan yang juga ditemukan dalam penelitian ini adalah ego sektoral, terutama dari sisi intrapemerintah. Komunikasi lintas sektor tingkat pemerintah kurang efektif, sehingga program kerja intrapemerintah kurang terkoordinasi secara terpadu untuk mencapai sasaran kampung lokus *stunting*. Ego sektoral terjadi karena adanya kepentingan sektoral yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi. Kepentingan sektoral ini dapat menghambat proses kolaborasi, karena terjadi upaya untuk mempertahankan kepentingan sektoral masing-masing pihak tanpa memperhatikan kepentingan bersama dalam upaya penanggulangan *stunting*.

Hasil dari temuan dapat di visualisasikan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 12. Proses Kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu
(Sumber : Data diolah peneliti, 2024)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini mencakup dua poin. Poin pertama adalah kolaborasi pendekatan kearifan lokal Satu Tungku Tiga Batu berhasil mempertemukan kepentingan, pendapat, dan keperluan tokoh pemerintah, adat, dan agama dalam rangka penanggulangan *stunting* pada diskusi tatap muka secara informal (*wewowo*) dimana semua *stakeholder* dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka (*co-determination*). Pemahaman bersama yang muncul dari kolaborasi yaitu pemahaman mengenai urgensi penanggulangan *stunting* secara bersama-sama sebagai keluarga besar Fakfak. Kemenangan kecil yang tercapai dalam proses kolaborasi ini terlihat dari perjanjian tertulis yang merupakan komitmen masing-masing *stakeholder* terhadap usaha penanggulangan *stunting* secara kolaboratif.

Poin kedua yaitu pendukung dan hambatan. Pendukung proses kolaborasi terdiri dari kesadaran untuk berkolaborasi sebagai makhluk sosial dan mencapai tujuan secara bersama-sama, sejarah hubungan kerja sama yang positif di masa lalu, dan pembangunan tim dalam penanggulangan *stunting*. Sedangkan hambatan dalam kolaborasi ini terdiri dari masih adanya ketimpangan biaya yang muncul, dimana tersedianya anggaran sepenuhnya ada di pemerintah, sedangkan tokoh adat dan tokoh agama tidak memiliki anggaran, selanjutnya dari sisi sumber daya manusia terlihat adanya kurangnya pemahaman khususnya dari OPD setempat, yang terakhir adalah adanya ego sektoral antara *stakeholder* yang terlibat (dari pihak pemerintah).

5.2 Saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* antara tokoh pemerintah, adat, dan agama. Pertama, disarankan untuk membentuk tim dengan pembagian tugas, peran, dan fungsi yang jelas agar tidak terjadi dominasi satu pihak dan memastikan partisipasi aktif dari semua pilar. Selain itu, *Wewowo* sebaiknya menjadi rutinitas dengan agenda pertemuan yang jelas untuk evaluasi dan monitoring, agar penurunan kasus *stunting* dapat berlangsung berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperjelas

alokasi anggaran untuk kegiatan kolaborasi ini agar tidak terjadi hambatan akibat kekurangan dana. Terakhir, diperlukan pelatihan khusus dan komunikasi berkelanjutan antara SDM di lapangan dan ahli untuk meningkatkan kinerja dalam penanggulangan stunting.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis lebih mendalam aspek-aspek dalam kolaborasi Satu Tungku Tiga Batu. Selain itu, studi perbandingan antara daerah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan kolaborasi ini di berbagai konteks sosial dan lingkungan yang berbeda, serta mengungkap strategi, pendekatan, dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi hambatan dan mempromosikan pendukung kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, A., Andreoli, M., & Rovai, M. (2021). Adaptive reuse of a historic building by introducing new functions: A scenario evaluation based on participatory mca applied to a former carthusian monastery in Tuscany, Italy. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su13042335>
- Ao, D. (2018). *The relationship between public and private management: A review*. 51(Icemgd), 182–185. <https://doi.org/10.2991/icemgd-18.2018.31>
- Asian Development Bank. (2021). *Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Nilai di Indonesia*. 1–166.
- Beckers, F., & Stegemann, U. (2021). A smarter way to think about public–private partnerships. *Mckinsey.Com*.
- Brogaard, L. (2021). Innovative outcomes in public-private innovation partnerships: a systematic review of empirical evidence and current challenges. *Public Management Review*, 23(1), 135–157. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1668473>
- Cheng, Z., Yang, Z., Gao, H., Tao, H., & Xu, M. (2018). Does PPP matter to sustainable tourism development? An analysis of the spatial effect of the tourism PPP policy in China. *Sustainability (Switzerland)*, 10(11), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su10114058>
- Dijkxhoorn, Y., Plaisier, C., Verwaart, T., Wagenberg, C. Van, & Ruben, R. (2019). Trusted sorghum: simulating interactions in the sorghum value chain in Kenya using games and agent-based modelling. *Journal of Development Effectiveness*, 11(2), 146–164. <https://doi.org/10.1080/19439342.2019.1624596>
- Du, Y., Fang, J., Ke, Y., Philbin, S. P., & Zhang, J. (2019). Developing a revenue sharing method for an operational transfer-operate-transfer project. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/su11226436>
- Eckhardt, J., Lauhkonen, A., & Aapaoja, A. (2020). Impact assessment of rural PPP MaaS pilots. *European Transport Research Review*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s12544-020-00443-5>
- Egger, C. (2023). The politics and spaces of public-private partnerships in

- humanitarian tech innovations. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 0(0), 1–17. <https://doi.org/10.1177/23996544231206822>
- Fouad, M., Rial, I., & Aydin, O. (2021). Mastering the Risky Business of Public-Private Partnerships in Infrastructure. *Departmental Papers*, 2021(010), 1. <https://doi.org/10.5089/9781513576565.087>
- Ginsburg, T. (2008). The judicialization of administrative governance: Causes, consequences and limits. In *Administrative Law and Governance in Asia: Comparative Perspectives*. <https://doi.org/10.4324/9780203888681>
- Gonçalves, E. C. C., Guerra, R. J. da C., & Figueiredo, V. M. P. de. (2023). Green Tourism and Sustainability: The Paiva Walkways Case in the Post-Pandemic Period (Portugal). *Sustainability (Switzerland)*, 15(18), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su151813969>
- Gong, J., Lu, Y., Xu, Y., & Fu, J. (2022). Fiscal Pressure and Public–Private Partnership Investment: Based on Evidence from Prefecture-Level Cities in China. *Sustainability (Switzerland)*, 14(22), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su142214979>
- Greve, C., & Hodge, G. (2022). Public-private partnerships. *Elgar Encyclopedia of Public Management*, 370–373. <https://doi.org/https://doi.org/10.5089/9781589064935.058>
- Hall, D. (2015). Why Public-Private Partnerships Do't Work: The many advantages of the public alternative. *The Report*, 56.
- Jayasena, N. S., Chan, D. W. M., & Kumaraswamy, M. M. (2022). Is Public–Private Partnership (PPP) a Preferred Strategy for Procuring Smart Infrastructure in Developed Countries: An Empirical Study of the Perceived Benefits, Barriers and Recommended Strategies. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 11). <https://doi.org/10.3390/su14116421>
- Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering - A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(1), 7–15. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
- Kuteesa, A., & Kyotalimye, M. (2019). Documentation and data handling: How can

- Africa promote record keeping and investment in data management? *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 19(1), 14171–14189. <https://doi.org/10.18697/AJFAND.84.BLFB1014>
- Lee, M., Han, X., Quising, P. F., & Villaruel, M. L. (2018). Hazard Analysis on Public – Private Partnership Projects in Developing Asia ADB Economics Working Paper Series Hazard Analysis on Public – Private Partnership Projects in Developing Asia. *Reconstruction Management Economic*, 548.
- Leigland, J. (2018). Public-private partnerships in developing countries: The emerging evidence-based critique. *World Bank Research Observer*, 33(1), 103–134. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkx008>
- Levai, C. M. (2012). Theoretical And Practical Aspects Of The Public-Private Partnership In The European Union. *Acta Universitatis George Bacovia. Juridica*, I(1), 232–249.
- Li, H., Ding, L., Ren, M., Li, C., & Wang, H. (2017). Sponge city construction in China: A survey of the challenges and opportunities. *Water (Switzerland)*, 9(9), 1–17. <https://doi.org/10.3390/w9090594>
- Ma, T.-J., Lee, G.-G., Liu, J., & Lae, R. (2022). Bibliographic coupling: a main path analysis from 1963 to 2020. *Information Research: An International Electronic Journal*, 27(1). <https://doi.org/10.47989/irpaper918>
- Mahmudi, M. (2003). New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Sinergi*, 6(1), 69–76. <https://doi.org/10.20885/sinergi.vol6.iss1.art5>
- Moro Visconti, R., Martiniello, L., Morea, D., & Gebennini, E. (2019). Can public-private partnerships foster investment sustainability in smart hospitals? *Sustainability (Switzerland)*, 11(6), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su11061704>
- Nurul, F., & Winoto, Y. (2022). *Pemetaan Bibliometrik terhadap Perkembangan Penelitian dengan Topik Arsitektur Informasi pada Google Scholar menggunakan Vosviewer*. 2(1), 43–60.
- Patino, C. M., & Ferreira, J. C. (2018). Inclusion and exclusion criteria in research studies: definitions and why they matter. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, 44(2), 84–84. <https://doi.org/10.1590/s1806-37562018000000088>

- PPIAF. (2018). Drawbacks of PPP. *Overview and Diagnosis, Module 1*(March), 28–33.
- Reynaers, A. M., & Graaf, G. D. (2014). Public Values in Public-Private Partnerships. *International Journal of Public Administration*, 37(2), 120–128. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.836665>
- Rifai, B. (2016). Hinderence of Electricity Public Private Partnership (PPP) and Need of Policy Improvement. *Journal of Economics and Development*, 24(1), 51–66. <https://doi.org/10.14203/JEP.24.1.2016.51-66>
- Roehrich, J. K., Lewis, M. A., & George, G. (2014). Are public-private partnerships a healthy option? A systematic literature review. *Social Science and Medicine*, 113, 110–119. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.03.037>
- Ross, T. W., & Yan, J. (2015). Comparing Public–Private Partnerships and Traditional Public Procurement: Efficiency vs. Flexibility. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 17(5), 448–466. <https://doi.org/10.1080/13876988.2015.1029333>
- Sharma, M., Bindal, A., & Cantt, S. D. C. A. (2014). *Public-Private Partnership*. 7, 1270–1274.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tang, L. Y., Shen, Q., & Cheng, E. W. L. (2010). A review of studies on Public-Private Partnership projects in the construction industry. *International Journal of Project Management*, 28(7), 683–694. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.11.009>
- Tarasenko, I., Kruhlov, V., Stepanenko, T., Moroz, G., & Lebedchenko, V. (2023). Public-Private Partnerships in Natural Resource Management As a Basis for the Implementation of the Ecological and Economic Security Doctrine of Ukraine’S Development. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), 1–14. <https://doi.org/10.55908/SDGS.V11I3.819>
- The World Bank. (2022). Government Objectives: Benefits and Risks of PPPs. *PPP Overview*, 1(10–31), 7.

- Turina, N., & Car-Pusic, D. (2006). Overview of PPP models and the analysis of the opportunities for their application. *In 7th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction.*
- Vaslavskiy, Y. I. (2022). Public-Private Partnership: High-Impact Alliance for Sustainability Targets. *Vestnik MGIMO-Universiteta*, 15(5), 27–63. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2022-5-86-27-63>
- Verma, R., Lobos-Ossandón, V., Merigó, J. M., Cancino, C., & Sienz, J. (2021). Forty years of applied mathematical modelling: A bibliometric study. *Applied Mathematical Modelling*, 89, 1177–1197. <https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.07.004>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>

LAMPIRAN

UTS ePRESS

Home About Books Journals Publish with us Research integrity Contact

Journal Home Current Previous Issues Announcements About

septiuland09

Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal

Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal is concerned with developing a better understanding of social change and cultural cohesion in cosmopolitan societies. Its focus lies at the intersection of conflict and cohesion, and in how division can be transformed into dialogue, recognition and inclusion. The Journal takes a grounded approach to cosmopolitanism, linking it to civil society studies. It opens up debate about cosmopolitan engagement in civil societies, addressing a range of sites: social movements and collective action; migration, cultural diversity and responses to racism; the promotion of human rights and social justice; initiatives to strengthen civil societies; the impact of 'information society' and the context of environmental change.

This journal does not charge any type of article processing charge (APC) or any type of article submission charge.

Make a Submission

Information

For Readers

For Authors

For Librarians

About the Journal

DOAJ seal

UTS ePRESS

English View Site septiuland09

Submissions

My Queue Archives

My Assigned

9588 Septi Wulandari LOCAL WISDOM "SATU TUNGKU TIGA BATU" IN STUNTING REDUCTION: A COLLAB...

Review

0/1

1 of 1 submissions

Platform & workflow by OJS / PKP